

# Suku Bangsa Minangkabau

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG  
KOLEKSI BIDANG ILMU  
TIDAK DIPINJAMKAN  
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN

Oleh

Drs. AMIR B.

FAKULTAS KEGURUAN PENGETAHUAN SOSIAL  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

P A D A N G

1978

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Geografis .....	1
1.2. Nagari Pertama .....	3
BAB II. ORGANISASI MASYARAKAT.	
2.1. Sistem kekerabatan .....	10
2.2. Sistem kemasyarakatan .....	12
2.3. Sistem warisan .....	16
BAB III. PEMBAHARUAN.	
3.1. Perekonomian .....	19
3.2. Administrasi pemerintahan .....	24
3.3. Agama Islam .....	29
BAB IV. PENUTUP .....	36
DAFTAR BACAAN .....	40

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1 G e o g r a f i s

Propinsi Sumatera Barat terletak di Pantai Barat pulau Sumatera. Di sebelah Utara berbatas dengan Propinsi Sumatera Utara, di sebelah Timur dengan Propinsi Riau dan Jambi, di sebelah Selatan dengan Propinsi Bengkulu dan di sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Kecuali di kepulauan Mentawai, sebagian besar penduduk Propinsi Sumatera Barat adalah suku bangsa Minangkabau. Mereka mendiami daerah dataran tinggi dan daerah bagian pesisir. Bagian dataran tinggi yakni darat (= darek) merupakan daerah asal suku bangsa Minangkabau. Secara tradisional daerah tersebut disebut Luhak Nan Tigo (=Luhak yang tiga), yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak 50 Kota. Penduduk Pesisir ialah mereka yang mendiami bagian pantai Samudera Indonesia. Mereka berasal dari darat.

Penduduk Sumatera Barat tersebar dalam kelompok-kelompok teritorial yang disebut nagari. Lebih kurang terdapat 543 nagari diseluruh Propinsi Sumatera Barat.

Daerah Propinsi Sumatera Barat bergunung-gunung. Bukit Barisan membentang dari Utara ke Selatan, dengan puncak puncaknya yang tinggi seperti Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago, Gunung Talang dan Gunung Pasa-man. Tanah vulkanis dan hujan yang cukup menyebabkan

banyak penduduk terikat pada kegiatan pertanian, penanaman padi di sawah dan di tegalan, penanaman sayur-sayuran penanaman tanaman perdagangan seperti cengkeh, tembakau, kopi, kelapa, karet dan kulit-manis. Hutan menghasilkan beberapa hasil hutan seperti damar, rotan.

Danau, sungai merupakan sumber perikanan darat dan di sepanjang pantai penduduk mengusahakan penangkapan ikan. Di beberapa daerah dijumpai emas yang sampai sekarang belum diusahakan, sedangkan tambang Batu Bara terdapat di Bawah Lunto. Di daerah yang kurang subur penduduk mengusahakan beberapa jenis usaha kerajinan tangan, per-tenunan atau mereka berjerak dalam usaha perdagangan.

Kondisi jalan raya sekarang sudah agak baik. Perhubungan antar kota dan antar Propinsi-propinsi yang berdekatan dan berbatasan berjalan dengan lancar, kecuali ke dan dari Propinsi Bengkulu.

Luas propinsi Sumatera Barat 42.297.30 m<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus 1971 sejumlah 2.792.221 orang. Propinsi Sumatera Barat terdiri dari delapan daerah Swatantara tingkat II dan enam kotamadya dengan urutan sebagai berikut :

1. Kabupaten Tanah Datar.
2. Kabupaten Agam
3. Kabupaten 50 kota.
4. Kabupaten Solok
5. Kabupaten Bawah Lunto Dijunjung

6. Kabupaten Padang Pariaman
7. Kabupaten Pasaman
8. Kabupaten Pesisir Selatan

Kotamadya ialah :

1. Kotamadya Padang
2. Kotamadya Bukittinggi
3. Kotamadya Solok
4. Kotamadya Payakumbuh
5. Kotamadya Sawahlunto
6. Kotamadya Padang Panjang.

### 1.2 Nagari Pertama

Buku bangsa Minangkabau yang mendiami Propinsi Sumatera Barat termasuk kedalam rumpun bangsa Deutro Melayu (Austronesia). Perpindahan bangsa Deutro Melayu ke Nusantara diperkirakan oleh para ahli ± 500 tahun sebelum Masehi (pada zaman Logam), di sebabkan oleh karena desakan-desakan bangsa-bangsa dari daerah Utara Asia. Bangsa Deutro Melayu setelah terdesak dari daerah asalnya di Yunan, pindah ke Selatan di pantai-pantai Hindia Belakang dan karena terdesak lagi maka mereka menyebar melalui laut dengan perahu bercadik ke pulau-pulau di Selatan Asia Tenggara dan sampai di daerah ini.

Yang menetap di pantai Timur Sumatera bahagian Tengah, nantinya memudiki sungai-sungai yang bermuara ke Selat Melaka, akhirnya mereka sampai di Palalawan, yaitu daerah sekitar pertemuan sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Pada permulaan datang mereka menetap sepanjang

aliran sungai Batang Kampar dan di dalam gua-gua. Ini terbukti banyaknya dijumpai pecahan-pecahan tembikar di sepanjang sungai tersebut dalam daerah Riau. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka berburu dan menangkap ikan.

Karena daerah pertemuan sungai Jampar Kiri dan Kampar Kanan, sering mengalami banjir dan juga karena ingin mencari tanah yang subur untuk bertani (karena di negeri asal mereka, telah mengenal bercocok tanam) mereka memudiki sungai-sungai itu ke pedalaman Sumatera Barat. Yang ke pedalaman Sumatera Barat ini hidup menetap dan mendirikan kampung yang pertama yang bernama Minangkabau di sebelah Utara Batunankar sekarang. Itulah nagari pertama di Sumatera Barat. Menurut Van der Tuuk, Minangkabau itu berasal dari kata Pinang Khabu yang berarti nagari asal. Orang-orang yang telah menyebar itu tentulah akan menyebutkan nagari Minangkabau itu sebagai nagari asal bagi orang Minangkabau yang sekarang.

Karena mereka telah memiliki tanah yang subur dan kebudayaan yang mereka bawa dari tanah asal mereka di Yunan sudah mengenal bercocok tanam, maka mereka membuat sawah-sawah dan menanam padi, serta memelihara ternak. Mereka telah hidup menetap dan berkumpul dan tidak mengembara lagi, berarti pembentukan suatu masyarakat yang memerlukan segala peraturan dan kerja sama. Pembahagian kerja, memungkinkan perkembangan berbagai macam cara didalam ikatan kerja sama itu (organisasi masyarakat). Maka timbulah usaha gotong royong, membuat ladang, sawah, rumah

5  
gadang (rumah palung) untuk tempat tinggal mereka. Ini dapat dibuktikan sampai sekarang dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat masih ada tradisi gotong royong ini dalam hal-hal seperti kesawah, irigasi, kematian, perkawinan, membangun rumah. Ini disebabkan karena kebudayaan merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka.

Dari mula berdirinya nagari pertama di Sumatera Barat, kita tidak memperoleh bukti-bukti bahwa sebelum abad ke XIV, pernah berdiri kerajaan di daerah ini. Barulah pertengahan abad ke XIV Adityawarman seorang panglima kerajaan Majapahit berhasil (1347-1375 M) mendirikan kerajaan Pagarruyung dekat Kota Batusangkar sekarang ini.

## B A B II

### ORGANISASI MASYARAKAT

Kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagarruyung (Batusangkar) secara defacto menguasai seluruh negari-negari. Kerajaan Pagarruyung bukanlah merupakan kerajaan yang kuat terlebih-lebih sesudah pemerintahan Adityawarman ( ± 1347-1375).

Negari-negari yang merupakan satuan teritorial hanya diikat oleh suatu rasa penghargaan atas kekeramatan raja Minangkabau. Isolasi antara negari-negari baik secara fisik maupun psikis tidak menjadikan Minangkabau suatu negara yang kuat dan benar-benar berdaulat kedalam dan keluar.

Perbatasan antara satu negari dengan negari lain tidak jarang hanya memperenggang hubungan antara penduduk masing-masing negari. Pembangunan negari kelihatannya tidak dibina oleh hanya satu orang tetapi secara bersama-sama. Mereka yang pertama inilah peletak dasar dari negari. Mereka yang menebas hutan dan membuat persawahan.

Orang-orang ini disebut orang asli dalam sebuah negari. Umumnya mereka mempunyai sawah dan tanah yang luas dan mereka pulalah yang sering disebut sebagai bangsawan negari yang mengetahui segala sesuatu mengenai perkembangan negari. Mereka pula yang meletakkan dasar bagi kebiasaan setempat atau adat istiadat yang pada umumnya dianggap lebih sempurna oleh penduduk negari itu daripada adat istiadat negari lain.



Dasar inilah yang menyebabkan sukarnya diterima perkawinan antar negari.

Rasa persatuan antara sesama anggota negari sangat kuat. Tepian tempat mandi bersama, kepala bandar untuk persawahan membutuhkan kerjasama yang erat. Begitu juga dengan pembuatan balai adat dan gelanggang sebagai sumber hiburan satu-satunya.

Serangan dari musuh mengharuskan mereka membuat koto yang dipagari dengan buluh di sekitarnya. Dalam menjalankan aktifitas pertanian, baik di sawah maupun di ladang kedua golongan, laki-laki dan wanita sama-sama aktif. Ditempat-tempat pertanian atau perladangan yang jauh dari negari didirikan teratak. Tidak jarang pula terjadi suatu teratak lama-lama berkembang menjadi sebuah negari.

Rumah-rumah di dalam negari disebut rumah gadang. Rumah ini berbentuk rumah panggung dan atapnya diberi bergonjong tanduk kerbau. Biasanya dihalaman rumah gadang berdiri pula rangking tempat menyimpan padi. Membawa tiang dari hutan serta menegakkan tiang-tiang tersebut untuk membuat rumah gadang dilakukan secara gotong royong oleh semua penduduk negari.

Tiap-tiap penduduk negari merasa ikut berdukacita bila ada penduduk negari ditimpa kenalangan atau musibah dan begitu pula kegembiraan akan dihayati secara bersama. Perkembangan penduduk negari yang tidak dapat diikuti oleh perkembangan serta perluasan tanah di sekitarnya menyebabkan adanya perpindahan-pindahan untuk membangun negari baru ataupun teratak pada permulaannya.

Hal ini menyebabkan timbulnya pengertian belahan yaitu pecahan satu kelompok kekeluargaan dari negari yang satu dengan negari yang lain. Di samping itu sering pula dijumpai adanya suatu negari yang kaum prianya dapat beristeri dengan wanita negari lain sedang kaum peria negari ini tidak diperkenankan sebaliknya. Walaupun secara politis tidak terdapat suatu kesatuan yang kokoh diantara negari-negari namun secara kulturil mereka merupakan suatu satuan yang bulat.

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Minangkabau. Bahasa ini erat hubungannya dengan bahasa Melayu. Tiap-tiap kata dalam bahasa Melayu ada kesamaannya dalam bahasa Minangkabau. Yang berbeda hanyalah bunyi-bunyi tertentu. Antara berbagai daerah dan kadang-kadang antara negari yang bertetanggapan terdapat perbedaan dialek. Di samping faktor bahasa ada faktor lain yang merupakan perekat bagi kesatuan negari-negari, merupakan pedoman bagi anggotanya bagaimana sebaiknya bertindak dan bertingkah laku.

Menurut sejarah Minangkabau, adat dibentuk oleh dua bersaudara Dt. Ketenanggungan dan Dt. Perpatih Nan Sabatang. Kedua mereka ini merupakan peletak dasar dari adat Minangkabau yang menjadi pedoman bagi seluruh negari. Adat ini ditanamkan pada waktu kerajaan Minangkabau masih mempunyai kekuasaan yang penuh dan nyata atas seluruh negari-negari. Negari-negari di samping pendukung adat juga diatur oleh adat.

Adat mengatur hubungan antara manusia sesamanya, mengatur kedudukan seseorang sebagai pribadi, mengatur susunan masyarakat, mengatur tujuan masyarakat serta menentukan cara mencapai tujuan masyarakat itu.

Jadi adat merupakan keseluruhan sistem nilai yang menjadi dasar dan pedoman untuk bertindak dan bertingkah laku di samping sekaligus merupakan sumber untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai. Dasar dari formulasi adat adalah ketentuan-ketentuan yang berdasar dalam alam sekitar dan karenanya adat.

1. Dapat bervariasi sesuai dengan keadaan dan waktu.
2. Dapat disempurnakan dengan nilai-nilai yang selama ini belum dimiliki dan dianggap berguna untuk kebaikan masyarakat dan anggota masyarakat serta adat itu sendiri.

Maka kita kenallah adanya tangga urutan adat yaitu :

1. Adat yang sebenarnya adat
2. Adat yang diadatkan
3. Adat yang teradat
4. Adat istiadat.

Klasifikasi adat ini mencerminkan bagaimana terjadinya proses pembentukan dan penyempurnaan adat, ruang lingkungannya serta intensifikasi pelaksanaannya.

Untuk membahas bagaimana adat mengatur kehidupan anggota dan masyarakat negeri, berikutnya akan dikemukakan

tiga lembaga, yaitu :

1. Sistem kekerabatan
2. Sistem sosial
3. Sistem ekonomi.

## 2.1 Sisten Keherabatan

Sisten kekerabatan di Minangkabau adalah matrilineal. Garis keturunan seseorang dengan segala aspek-aspeknya di hitung menurut keturunan ibu. Kelompok kekerabatan terkecil adalah sanande (=satu ibu) yaitu mereka yang lahir dari ibu yang sama dengan pimpinan saudara laki-laki ibu yang disebut manak.

Gabungan kelompok kekerabatan sanande disebut sapa ruik (=satu perut) yang biasanya dihitung sejauh lima keturunan. Bagi kelompok kekerabatan paruik yang kecil, paruik mungkin sama dengan kelompok kekerabatan sanande, sedangkan bagi kelompok kekerabatan paruik yang besar mungkin terjadi pemecahan-pemecahan yang mendiami runch gadang yang berlainan.

Kelompok kekerabatan di antara kelompok kekerabatan paruik yang sama yang mendiami satu daerah tertentu disebut kampung. Kelompok kekerabatan ini dipimpin oleh seorang penghulu, yaitu salah seorang dari manak.

Menurut besar dan perkembangannya kelompok kekerabatan sanande atau sapa ruik mungkin mendiami satu runah Gadang atau lebih. Kelompok yang lebih besar dari kelompok kekerabatan kampung adalah suku. Suku sama dengan seperempat dan karenanya ditiap negari akan dijumpai paling kurang empat macam suku. Keturunan berikut serta merta menjadi anggota suku ibunya.

Suku yang tertua adalah Koto, Piliang, Bodi dan Canganiago. Tidak ayal lagi bahwa pendatang-pendatang baru kedalan suatu negari atau kelompok kekerabatan yang ingin

menisahkan diri menjadi kelompok baru menjadi sebab timbulnya berbagai suku dikemudian hari.

Perkawinan merupakan urusan kelompok kekerabatan.

Perkawinan harus dilakukan antar suku tapi dapat juga dilakukan antara sesama anggota suku sebagai bukti bahwa suku bukanlah kelompok genealogis yang murni. Tetapi perkawinan antara sesama anggota kelompok kekerabatan kampung dilarang. Yang penting dalam perkawinan adalah pertukaran lambang antara kedua kelompok sedangkan istilah mas kawin tidak dikenal. Suami tinggal di rumah kelompok kekerabatan isterinya sedangkan tugasnya sebagai anggota naupun manak dari kelompok kekerabatannya tetap dijalankannya. Dia disebut orang sumando oleh seluruh kerabat isterinya sedangkan seluruh kerabat pria dari isterinya disebut tunganai atau ninik manak.

Seluruh kerabat wanita dari pengantin peria disebut pasumandan sedangkan anaknya menyebut kerabat bapaknya bako (induk bako). Anak dari peria anggota kelompok kekerabatan samandé, saparuik naupun sakampung disebut anak pisang.

Perkawinan tidaklah menyebabkan seseorang keluar atau meninggalkan kelompok kekerabatan asalnya. Perkawinan yang idial adalah perkawinan antara kemenakan yaitu anak pria dari saudara wanita dengan anak wanita dari manak.

Peria tidak bertanggung jawab penuh atas kehidupan isteri dan anak-anaknya dan dia tidak mempunyai waktu yang cukup bagi terlaksananya proses sosialisasi dari anaknya melaluinya.

Satu sama lain akan mengakibatkan timbulnya keinginan untuk beristeri lebih dari satu sebagai tanda larisnya anggota satu kelompok kekerabatan serta renggangnya hubungan antara anak dengan bapak. Karena ruangan khusus untuk anggota pria di rumah gadang tidak tersedia maka biasanya mereka berkumpul, bermain-main atau bermalam disurau atau di rumah kosong tertentu.

Di sinilah mereka mengaji dan bertukar pendapat sesama-nya. Mereka lebih cepat merasa dewasa.

## 2.2 Sisten kenasyarakatan

Di dalam masyarakat Minangkabau hanya dijumpai sisten kekerabatan seperti diuraikan di atas.

Sisten kepemimpinan secara historis nampaknya dilakukan oleh sebuah dewan. Pimpinan yang merupakan dewan ini disebut Rajo Tigo Belo (Raja Tiga Sila), yang batas-batas kekuasaannya dijelaskan sesuai dengan panggilan mereka.

1. Rajo Alam nan Dipatuan, berkedudukan di Pagarruyung. Merupakan penguasa tertinggi.
2. Rajo Adat, berkedudukan di Buo. Bertugas dalam bidang adat.
3. Rajo Ibadat, berkedudukan di Sumpur Kudus. Bertugas dalam bidang agama.

Ketiga penguasa ini dibantu pula oleh suatu dewan pemerintah yang batas-batas kekuasaan dan wewenangnya juga dijelaskan.

1. Bandaharo, berkedudukan di Sungai Tarab, menegang urusan adat.

2. Pandito (tuan Kadi), berkedudukan di Padang Ganting, menegang urusan Agama.
3. Mangkhudun, berkedudukan di Sunanik, menegang urusan keamanan.
4. Indono, berkedudukan di Suruaso, menegang urusan perekonomian.

Keempatnya sebagai badan eksekutif disebut "basa anpek balai" dengan dipimpin oleh Bahdaharo.

Untuk kelancaran pemerintahan nagari dipakai sisten pemerintahan kelurahan, Laras Koto Piliang dan Laras Bodi Canigo. Nagari-nagari bebas memilih salah satu diantara bentuk kelurahan ini.

Kedua sisten pemerintahan ini mempunyai perbedaan terutama dalam banyaknya anggota dewan pemerintahan nagari. Pada Laras Koto Piliang, pemerintahan nagari dilakukan oleh Penghulu Pucuk dan tiap-tiap suku dalam nagari dan masing-masingnya dibantu oleh panglima untuk urusan keamanan, bandaro untuk urusan perekonomian dan sekretariat, kadi untuk urusan keagamaan. Bersama-sama mereka disebut penghulu kaampek suku.

Untuk kelancaran tugasnya, bandaro dibantu pula oleh nanti, panglima oleh dubalang sedangkan fungsi kadi dijalankan oleh iman, bilal dan khatib.

Seluruh penghulu, yaitu penghulu-penghulu kaampek suku beserta pembantu-pembantunya tetap berada pada keluarga tertentu.

Pada Laras Bodi Caniago, pemerintahan negari dilakukan bersama oleh penghulu-penghulu andiko yakni penghulu-penghulu dari tiap-tiap kampung atau paruik. Perbedaan ini dapat dicernini pada perbedaan dalam bentuk balai adat, tempat berlangsungnya pemerintahan negari.

Balai adat dalam kelarasan Koto Piliang mempunyai anjung (bagian yang ditinggikan) pada ujung pangkalnya sedangkan balai adat dalam kelarasan Bodi Caniago tidak (datar). Perbedaan lain yang berarti ialah bahwa kelarasan Koto Piliang mengatur sisten pemerintahan secara umum dan daerah rantau, sedangkan kelarasan Bodi Caniago mengatur kehidupan penduduk di daerah asal.

Karenanya pada keluarga raja-raja di Pagarruyung dan raja-raja yang memerintah rantau berlaku sisten patrilineal terutama untuk jabatan dan gelar kebangsawanan. Setiap anggota pria dari kelompok kekerabatan paruik atau kampung dari suatu negari mempunyai hak untuk menjadi penghulu baik berdasarkan heredity yang dipunyai maupun berdasarkan kualitas pribadi.

Penghulu tidaklah mempunyai kekuasaan yang nyata. Dia adalah pengetua, sedangkan setiap anggota yang telah dewasa mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat. Kehidupan para anggota yang belum dewasa merupakan kehidupan yang diatur oleh sekian banyak orang disamping sekaligus merupakan persiapan untuk jadi pengetua berikutnya.

Tiap-tiap putusan yang diambil baik dalam tingkat kelompok kekerabatan paruik/kampung, suku maupun negari dilak-



kukan secara musyawarah. Musyawarah tingkat negari, disebut kerapatan negari. Kerapatan negari ini merupakan lembaga kekuasaan tertinggi dalam negari. Pedoman yang dipergang dalam pengambilan putusan dalam suatu kerapatan negari adalah alur dan patut.

Alur adalah konsepsi adat yang telah diakui secara umum sedangkan patut adalah penterapannya kepada ruang dan waktu. Cara pengambilan putusan demikian membutuhkan keahlian berargumentasi di samping perlu adanya kesadaran untuk menghargai pendapat orang lain. Bila tidak maka ia akan menimbulkan ekses, pengambilan putusan yang laiban serta ingin menang sendiri, dengan membenarkan pendapat orang lain tetapi tetap menjalankan apa yang dikehendaki. Pertumbuhan dan perkembangan negari menunjukkan bahwa di dalam negari tidak hanya dijumpai orang asli tetapi juga dijumpai beberapa pendatang baru. Para pendatang baru ini tidak ikut menebas hutan dan membuat persawahan pada waktu negari mulai didirikan. Mereka tidak mempunyai tanah pusaka dan tidak termasuk dalam salah satu kelompok kekerabatan yang telah ada. Mereka disebut orang dagang.

Perkawinan antara orang dagang dengan orang asli jarang terjadi. Di samping itu di dalam negari dapat juga dibedakan antara kaum penghulu yaitu mereka yang memegang penerintahan kelompok kekerabatan dalam negari dengan penduduk biasa.

Hubungan kedua lapisan sosial ini biasanya dijelaskan dengan sebutan ninik manak dan kenenakan. Dipandang dari kedudukan ninik manak maka kenenakan dapat dibedakan.

- a. Kenenakan di bawah dagu, yaitu kenenakan dari kelompok kekerabatan samande, saparuik dan sakampung.
- b. Kenenakan di bawah pusat, yaitu kenenakan yang berasal dari negeri lain, mempunyai suku yang sama dengan ninik manak dan telah diterima secara resmi. Mereka tidak berhak menjadi penghulu tetapi dapat mempunyai hak atas tanah.
- c. Kenenakan di bawah lutut, yaitu mereka yang bekerja untuk dan pada ninik manak. Mereka ini tidak berhak untuk menjadi penghulu dan juga tidak berhak menguasai tanah.

### 2.3 Sistem Warisan

Orang asli yang membuka tanah dan hutan dengan istilah melancang melatiah, mempunyai kekayaan dalam bentuk tanah, sawah, ladang, tanah perumahan dan tanah per kuburan.

Kekayaan ini berikuk dengan rumah gadang dan ranguking di atasnya menjadi harta kelompok kekerabatan dan karenanya diwariskan menurut garis ibu.

Kekayaan ini disebut pusako (=pusaka). Kekayaan inateril berupa gelar dan kedudukan dalam masyarakat di sebut sako. Kekayaan inateril ini juga diwariskan menurut garis ibu kecuali pada golongan raja-raja.

Tanah-tanah atau hutan yang belum dimiliki oleh suatu kelompok kekerabatan dan yang dicadangkan untuk anggota kelompok negari di masa-masa mendatang disebut tanah ulayat. Tanah ulayat dalam negari-negari yang menganut sistem pemerintahan Laras Koto Piliang dikuasai oleh penghulu pucuk. Setiap anggota kelompok negari diperkenankan menguasakannya atas keizinan penghulu pucuk. Tanah ulayat dalam negari-negari yang menganut sistem pemerintahan Bodi Caniago dibagi diantara dan dikuasai oleh suku. Tiap anggota kelompok suku dapat mengusahakan tanah ulayat suku atas keizinan penghulu andiko.

Penusahaan tanah pusaka suatu kelompok kekerabatan dilakukan berdasar genggan beruntuk. Seluruh tanah pusaka kelompok kekerabatan patuik dibagikan dan diusahakan oleh kelompok kekerabatan samande. Secara keseluruhan tanah pusaka yang telah dikuasai oleh kelompok kekerabatan samande ini diurus oleh nanak sebagai kepala waris.

Warisan diatur menurut pertalian darah dari pihak ibu. Jika yang meninggalkan warisan tanah pusaka adalah wanita maka ahli waris adalah seluruh anak-anaknya. Bila dia tidak mempunyai anak, warisan tanah pusaka diterima oleh saudara-saudaranya. Jika yang meninggalkan tanah pusaka adalah pria maka ahli waris adalah saudara-saudaranya.

Garis lain yang diturut seandainya mereka yang meninggalkan tanah pusaka tidak mempunyai ahli waris menurut pertalian darah ibu adalah penentuan ahli waris menurut pertalian adat.

Ahli waris adalah mereka yang mempunyai pertalian adat terdekat. Pengertian hak milik perorangan atas tanah tidak ada. Tanah pusaka merupakan satu bagian yang integral dengan kelompok kekerabatan. Tanah pusaka tidak hanya merupakan sumber kegiatan-kegiatan ekonomi tetapi sekaligus juga merupakan lambang atau suatu status tertentu dalam masyarakat.

### 3.1 P e r e k o n o m i a n

Tidak adanya alat kekuasaan riil yang dipunyai kerajaan Minangkabau serta lemahnya hubungan antara negari dengan negari menyebabkan mudahnya kerajaan Aceh meletakkan kekuasaannya di pantai Barat pulau Sumatera.

Tiku, Pariaman, Padang, Painan dan Indrapura menjadi bandar-bandar perdagangan, tempat kerajaan Aceh mengumpulkan biaya bagi perjuangannya yang lama melawan Portugis. Kekuasaan kerajaan Aceh digantikan oleh kekuasaan Belanda dan setelah selesainya Perang Padri, mulailah masa penjajahan Belanda di seluruh Sumatera Barat.

Walaupun saudagar-saudagar dari Aceh jauh menasuki pedalaman Sumatera Barat, tetapi tidaklah banyak membawa pengaruh dan perubahan kepada kehidupan ekonomi penduduk di negari-negari.

Persawahan dan tegalan terutama menghasilkan padi dan kebutuhan pokok lainnya, Pertukaran dilakukan dalam bentuk barter yang sangat sederhana.

Tanaman paksa kopi, yang menyebabkan penderitaan penduduk merupakan awal perkenalan dengan tanaman perdagangan. Sesudah penghapusan tanaman paksa pemerintah penjajahan Belanda menaruh berbagai cara untuk memperoleh sumber-sumber keuangan, > Untuk memperlancar perdagangan tekstil serta hasil-hasil pabrik lainnya dan untuk mempermudah

pengumpulan dan pembelian tanaman ekspor pemerintah penjajahan Belanda berkepentingan untuk membuka jalan raya dan mendorong pertumbuhan pasar pada negari-negari tertentu.

Isolasi negari mulai menjadi pecah dan timbulah berbagai kerja sama antara negari-negari dalam membangun pasar serikat, sebagai tempat pertukaran yang mudah dikunjungi oleh penduduk negari di sekitarnya.

Tungsi pasar sebagai tempat dan lembaga pertukaran dalam sistem ekonomi uang menjadi mantap setelah pemerintah penjajahan Belanda membebaskan pajak kepada penduduk penduduk negari.

Sistem ekonomi uang berarti adanya saling ketergantungan kehidupan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya atau antara satu negari dengan negari lainnya. Adanya jenis-jenis barang baru yang selama ini belum dikenal oleh penduduk negari telah menyebabkan bahwa kehidupan ekonomi negari bukan lagi merupakan satu kesatuan penuh.

Kelompok kekerabatan tidak lagi merupakan satu satuan produksi yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggotanya baik karena timbulnya jenis-jenis kebutuhan baru maupun karena bertambah besarnya jumlah anggota kelompok kekerabatan. Masing-masing kelompok kekerabatan parauik telah merupakan kelompok kekerabatan etnonom dengan jalan menguasai dan mengusahakan tanah pusaka yang menjadi bagiannya.

MILIK PERPUSTAKAAN  
- IKIP-PADANG -

Rumah gadang tidak lagi merupakan tempat yang idiel untuk tinggal bersama dengan anak-anak dan bapak yang selama ini dikenal sebagai tamu telah lebih banyak mencurahkan tenaga dan waktunya dalam membina kehidupan bersama isteri dan anak-anaknya sebagai kelompok kekerabatan paruiik. Perkembangan paruiik menyebabkan bertambah kecilnya luas tanah pusaka yang dikuasai untuk usaha pertanian.

Pertanian karenanya tidak lagi menjamin kehidupan para anggota kelompok kekerabatan hingga menimbulkan dorongan untuk meninggalkan rumah. Hal ini ditunjukkan pula oleh adanya kesempatan-kesempatan kerja di luar usaha pertanian.

Ekonomi telah menciptakan golongan-baru dalam kehidupan negari, golongan pedagang dan golongan pekerja. Diduga bahwa pada mulanya perdagangan di negari tidak dilakukan oleh penduduk negari itu tetapi oleh penduduk negari lain. Orang dagang mengandung arti orang asing. Merantau dalam arti permulaan adalah meninggalkan negari dengan maksud mencari penghidupan baru yang pada waktunya kembali dengan hasil untuk dapat disumbangkan kepada kelompok kekerabatan.

Hal ini merupakan suatu kewajiban moril guna dapat menyelamatkan harta pusaka kelompok kekerabatan dengan arti menjamin kehidupan anggota wanita disamping sekaligus membayar kembali jumlah modal yang mereka bawa pada waktu meninggalkan rumah.

Ekonomi yang selanjutnya berkembang berkat mentalitas penduduk negari-negari yang cepat menyesuaikan usahanya dengan situasi pasar. Ladang kopi, tembakau, gula-manis, kelapa dan karet berkembang di mana-mana terutama di daerah-daerah yang kurang menghasilkan padi. Volume perdagangan bertambah besar.

Pedagang lama kelamaan tidak lagi merasa dan dianggap sebagai orang asing di dalam kehidupan negari. Dengan kekuatan ekonomi yang mereka miliki mereka telah dapat menguasai dan mengusahakan tanah. Para pedagang bukanlah merupakan golongan idealis dan karena itu hasil dari hubungan mereka dengan dunia luar berupa penerimaan ide-idea serta nilai-nilai kehidupan baru, tidak mereka kemukakan kepada masyarakat sekitarnya sebagai suatu tantangan tetapi mereka berikan dan tunjukkan berupa perubahan dalam cara bertingkah laku serta dalam cara bertindak mereka sendiri.

Mereka hilup dengan anak-anak dan isterinya, sebagai penyimpangan terhadap kehidupan kelompok kekerabatan dalam rumah gadang. Dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan isteri dan anak-anaknya baik dalam hal pendidikan maupun perkawinan, pendapat dan keputusan bapak dan bukan anak ataupun penghulu lagi yang menentukan walaupun pertukaran pendapat antara mereka tetap diadakan.

Harta yang dikumpulkan dalam kehidupan bersama dengan isteri dan anaknya merupakan jenis harta yang tidak diatur dalam hukum adat.



Konflik warisan yang menakan waktu lama, pertana-tana dapat diatasi dengan hibah beratti memindahkan hak milik harta pencaharian kepada kelompok kekerabatan anak dan isteri dengan setahu dan atas persetujuan seluruh waris kelompok kekerabatan bapak. Kesulitan akan timbul bila salah seorang waris tidak menyetujuinya. Akhirnya melalui konflik yang panjang pula harta pencaharian dipisahkan dari lembaga harta pusaka dan karena itu diwariskan kepada anak.

Seperti kita ketahui hukum warisan adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan. Konflik-konflik yang terjadi seperti di atas menimbulkan konflik-konflik dalam sistem kekerabatan. Konflik-konflik itu tidak menjadi sebab untuk makin berkurang para pedagang malahan menjadi dan merupakan jenis pekerjaan yang disukai oleh penduduk negari-negari. Merekalah yang menghambat penetrasi suku bangsa Cina dalam perdagangan di Sumatera Barat. Tetapi tidak dapat di sangkal bahwa konflik tersebut juga menjadi pendorong bagi beberapa pedang untuk melanjutkan usahanya di luar daerah Sumatera Barat.

Para penduduk negari yang mengalami kekurangan uang tunai untuk membeli berbagai kebutuhan serta untuk melunaskan utang pajak dapat menutupinya dengan menggadaikan tanah pusaka, sehingga pengolahannya dilakukan oleh pihak yang menenjang.

Untuk sahnya suatu gadai maka seluruh waris dari satu kelompok kekerabatan harus menyetujui dan menanda tangani surat gadai. Gadai biasanya diberikan untuk suatu waktu tertentu. Jumlah gadaian yang besar merupakan perubahan kearah penjualan.

Pada mulanya gadai hanya merupakan jalan keluar bagi kesulitan keuangan yang menyangkut kebutuhan kelompok kekerabatan secara umum, seperti biaya untuk memperbaiki rumah gadai, biaya penakaman anggota kelompok kekerabatan yang meninggal, biaya melangsungkan perkawinan bagi anggota wanita kelompok kekerabatan serta biaya-biaya yang dituntut pengeluarannya oleh adat seperti biaya untuk pelantikan penghulu baru dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan asal saja seluruh waris kelompok kekerabatan telah menyetujui dan menanda tangani surat gadai.

### 3.2 Administrasi pemerintahan

Akibat pertama dari administrasi pemerintahan penjajahan Belanda adalah timbulnya beberapa kota di daerah Sumatera Barat.

Kota-kota ini umumnya menjadi pusat pemerintahan di samping menjadi pusat perdagangan dan pendidikan. Karena kota pada mulanya adalah sebuah negeri maka penduduk kota merupakan campuran antara penduduk negeri yang bersangkutan dengan bermacam-macam pendatang baru.

Pendatang-pendatang baru terdiri dari bangsa asing, suku bangsa lain dan penduduk dari berbagai negari di sekitar kota. Tiap-tiap unsur penduduk kota menyebarkan nilai-nilai dan pola-pola bertingkah laku dan bertindak. Penyesuaian diri yang lebih dahulu diawali oleh berbagai konflik menyebabkan penduduk kota terbuka dan cepat menerima idea-idea serta nilai-nilai baru.

Dadanya berbagai macam lapangan pekerjaan menyebabkan penduduk kota tidak terikat kepada tanah pusaka. Kehidupan menjadi tidak terikat kepada kelompok kekerabatan. Perkawinan tidak lagi diatur oleh kelompok kekerabatan dan dalam kehidupan rumah tangga bapak adalah pemimpin. Kehidupan di kota adalah dinamis, karena bergantung kepada dunia sekitarnya serta persaingan antara sesama anggotanya. Di kota dapat dilihat adanya dua lapisan sosial. Lapisan penduduk bangsa asing yang mempunyai kekuasaan ekonomi maupun politis dan lapisan penduduk asli Indonesia baik kehidupan ekonomi maupun politis sangat lemah.

Bagian terbesar golongan bangsa Indonesia yang berada dan tinggal di kota bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda, pedagang kecil atau menengah serta pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan pemberian jasa. Golongan pegawai pemerintah jumlahnya makin lama makin makin banyak dan makin dapat menduduki posisi yang relatif lebih baik berkat pendidikan yang mereka terima

MILIK PERPUSTAKAAN  
- IKIP - PADANG -

di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Bagi yang mampu dapat melanjutkan pelajarannya ke pulau Jawa atau kenegeri Belanda. Umumnya mereka berasal dari anak-anak penghulu, anak-anak pedagang kaya ataupun anak-anak alim ulana yang bekerja sama dengan pemerintah Belanda.

Pengetahuan yang mereka terima dari pendidikan di sekolah serta pergaulan dengan orang-orang asing terutama orang Belanda menyebabkan mereka merasa tidak serasi dengan cara, corak serta nilai-nilai kehidupan masyarakat negari. Sifat-sifat individualisme dan rasa kebebasan yang telah ditanamkan selama masa pendidikan menyebabkan mereka ingin melepaskan diri dari kehidupan kelompok kekerabatan dan negari.

Kehidupan yang tidak tergantung kepada pertanian, dimana insisiatif serta kemampuan berdiri sendiri dan bersaing diutamakan menyebabkan solidaritas kelompok kekerabatan dan negari tidak lagi. Mereka punyai atau sedikit-tidaknya telah jauh berkurang. Mereka cepat atau lambat merasa kehilangan kontak dengan kehidupan negari. Untuk mempertahankan kehidupan yang telah mereka bina dengan isteri dan anak-anak mereka selama ini mereka memperjuangkan agar harta pencaharian yang diperoleh tidak dengan/melalui harta kelompok kekerabatan tidak dianggap sebagai bagian dari lembaga harta pusaka, dan supaya dapat diwariskan kepada anak-anak mereka. Perjuangan perlu

27

dilakukan karena bagi mereka hukum warisan sebagai bagian hukum perdata Belanda tidak berlaku. Walaupun akhirnya harta pencaharian diwariskan menurut garis bapak, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian mengenai pedagang, namun konflik belumlah selesai.

Sistem warisan menurut adat merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial dan sistem kekerabatan dan dengan demikian konflik tersebut merupakan awal bagi keinginan untuk melepaskan diri dari sistem kekerabatan dan sistem sosial yang sedang berlaku di negari-negari. Perkembangan pendidikan yang ditandai oleh bertambah banyaknya jumlah sekolah mempunyai arti bahwa jumlah kaum terpelajar makin bertambah besar pula. Baik karena pengaruh sistem pendidikan yang sedang dijalankan maupun perubahan-perubahan nilai dan sikap akibat pengaruh kehidupan kota telah menyebabkan sebahagian besar dari kaum terpelajar ini tidak berkeinginan untuk melanjutkan usaha dalam lapangan pertanian sebagaimana yang telah dan sedang dilakukan oleh generasi terdahulu di negari-negari. Satu sama lain menyebabkan bahwa pendukung sistem kekerabatan dan sistem sosial yang menjadi dasar dan pedoman kehidupan negari makin lama akan makin berkurang.

Dengan mulainya penjajahan Belanda berarti bahwa negari tidak lagi diperintahi oleh dewan panghuku, tapi oleh kepala negari yang diberi kekuasaan oleh pemerintah Belanda. Dengan demikian ia berubah dan mulai menjadi

penguasa di negari. Keputusan tidak lagi diambil berdasar alur dan patut sebagaimana yang dituntut oleh adat berserta penafsirannya tetapi merupakan kehendak dari pemerintah Belanda.

Kerapatan negari bukan lagi merupakan lembaga untuk bertukar pendapat dan menemukan putusan yang dapat diterima secara umum tetapi hanya merupakan rapat untuk menerima perintah yang harus dijalankan. Bahwa cara denikian tidak berkenan dan sesuai dengan sisten pemerintahan yang selama ini diadut dan dilaksanakan terbukti dengan banyaknya perlawanan bersenjata waktu pembebanan pajak kepada penduduk negari.

Jabatan penghulu tetap dipertahankan seperti biasa namun arti dan kekuasaan politisnya sudah jauh berkurang. Di samping banyaknya campur tangan pemerintah Belanda dalam pemilihan dan pengangkatan penghulu serta jabatan penghulu yang hanya menjadi penghubung antara kepala negari dengan anggota kelompok kekerabatan, maka wewenang dan pasor para penghulu makin lama makin berkurang.

Pemerintah Republik Indonesia tidak banyak merubah struktur pemerintahan negari dan hanya melanjutkan sisten pemerintahan sebagaimana yang telah dijalankan oleh pemerintah Belanda. Negari dipimpin oleh kepala negari yang dipilih oleh penduduk negari dan disyahkan oleh pemerintah. Kerapatan negari tidak lagi berfungsi sebagai lembaga legislatip tertinggi dalam negari tetapi hanya merupakan badan penasihat dan badan peradilan adat dan agama.

Keanggotaan kerapatan negari terdiri dari kaum penghulu, alim ulama dan cendekiawan. Lembaga legislatip negari adalah DPRN. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia negari merupakan kesatuan administrasi terkecil. Kehidupan negari tidak terpisah dari kehidupan negara sebagai satuan yang lebih besar. Penduduk negari tidak hanya menjadi penduduk satuan negarinya tetapi sekaligus menjadi warga dari negaranya. Dalam mengatur kehidupannya negari disamping memperhatikan kepentingan penduduk negarinya baik sebagai individu dan keseluruhan juga harus berpedoman kepada kepentingan bersama dari negari-negari disekitarnya ataupun daerah-daerah lain dari negara. Untuk kepentingan bersama banyak kita jumpai peraturan-peraturan yang membatasi ataupun mencabut hak anggota negari sebagai individu maupun sebagai keseluruhan. Tetapi walaupun demikian ternyata bahwa dalam proses pelaksanaannya pemerintah Republik Indonesia masih menggunakan lembaga-lembaga kenasyarakatan negari.

### 3.3 Agama Islam

Agama Hindu berpengaruh di Sumatera Barat di masa Adityawarman. Raja Minangkabau pertama yang memeluk agama Islam adalah Sultan Alif pada abad ke 16.

Agama Islam dibawa oleh pedagang-pedagang melalui pantai Barat dan kemudian menjalar ke darat. Masjid menjadi syarat untuk syahnya sebuah negari. Pusat pendidikan dan perkembangan agama Islam di Ulakan (Parianan)

MILIK PERPUSTAKAAN  
- IKIP-PADANG -

dibina oleh syekh Burhanuddin. Ajaran ini menafsirkan segala sesuatu dalam alam sebagai ujud dari Allah S.W.T. Dengan cepat ajaran ini bersatu dengan unsur agama Hindu yang masih dianut oleh penduduk. Maka lahirilah penyembahan dan pemujaan orang-orang atau benda-benda keramat, sihir, tenung dan sebagainya.

Antara Islam dan adat tidak dinyatakan ada pertentangan. Warisan yang menurut adat diturunkan menurut garis ibu tidak dinyatakan berlawanan dengan agama walaupun dalam hukum Faraidh dinyatakan lain. Pemerintahan berada di tangan pendhulu sedangkan urusan pengajian dipegang oleh Alim Ulama.

Keseimbangan ini berubah dengan masuknya paham Wahabi yang menghendaki pemurnian ajaran dan ibadah agama Islam sesuai dengan mazhab Hanbali. Gerakan pembersihan dan pemurnian ini dipelopori oleh H. Sunanik, H. Piobang dan H. Miskin yang baru kembali dari Mekah, berlaku dari tahun 1803-1820 dan disebut Gerakan Paderi. Gerakan-gerakan ini dijalankan dengan teror dan kekerasan berubah menjadi kekuatan politik yang berhadapan dengan kaum pendhulu sebagai penegang kekuasaan lama. Kaum paderi berhasil menanankan kekuasaannya.

Terjadilah lagi suatu asimilasi yang erat antara ajaran agama Islam dan adat sebagai pola bertingkah laku dan bertindak. Kalau dahulu persenyawaan adat dan agama Islam diungkapkan dengan pernyataan adat bersendi syarak

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG  
KOLEKSI BIDANG ILMU  
TIDAK DIPINJAMKAN  
KHUSUS DIPAKAI DALAM PERPUSTAKAAN



dan syarak bersendi adat maka sekarang kita kenal pernyataan adat bersendi syarak dan syarak bersendi Kitabullah (Qur'an). Kedudukan agama berada di atas kedudukan adat sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan: agama mengata dan adat memakai yang berarti bahwa adat adalah pelaksanaan ajaran-ajaran agama. Dalam hal dan situasi ini maka sangat dibedakan antara adat jahiliah dan adat islamiah. Adat jahiliah adalah adat yang tidak bersumber pada Qur'an dan Hadits sedangkan adat Islamiah adalah pola yang menasari cara bertingkah laku dan bertindak sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama yang terdapat di dalam Qur'an dan Hadits.

Dalam negari sekarang ada tiga lapisan sosial :

1. Para penghulu
2. Alim Ulama
3. Orang kebanyakan.

Tiga lapisan ini digambarkan dalam bentuk mesjid yang bertingkat tiga seperti dapat dijumpai di beberapa daerah.

Mesjid dan surau di negari-negari tidak hanya merupakan tempat kegiatan ibadah tapi juga merupakan lembaga pendidikan tempat anak-anak muda menempuh proses sosialisasi. Perkembangan menunjukkan bahwa di negari-negari prestise alim ulama makin lama makin tinggi dan akhirnya dengan kekuasaan politik yang mereka miliki mereka menjadikan seluruh Sumatera Barat satu satuan politik yang kuat.

32

Kedudukan ini mengancam kepentingan perdagangan Belanda di pantai Barat yang menyebabkan timbulnya Perang Paderi. Perang ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dan berlangsung dari 1821-1837 dimenangkan oleh pihak Belanda. Belanda kembali memulihkan kekuasaan penghulu dengan arti sebagai lembaga untuk menjalankan kekuasaan Belanda.

Perkembangan agama Islam di Sumatera Barat sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di jazirah Arab. Mazhab Syafei yang mulai berpengaruh menggantikan mazhab Hanbali di tanah Arab mulai menjalar pula ke Sumatera Barat. Karena ajaran ini lebih bersifat toleran dengan kekuasaan asing, pemerintah Belanda mendorong perkembangannya. Banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kaum ulana golongan ini, seperti untuk menunaikan ibadah haji dan penerimaan anak-anak mereka pada sekolah-sekolah pemerintah.

Belanda berhasil menancapkan kekuasaannya melalui penghulu dan alim ulana yang dapat dipengaruhinya sedangkan untuk guru-guru agama serta alim ulana yang baru kembali dari Mekah dan tidak bersedia berkerja sama dengannya, pemerintah Belanda berusaha menancilkannya dari kehidupan penduduk negeri.

Pemisahan yang tegas antara golongan terakhir dengan golongan penghulu yang semata-mata dijalankan untuk kepentingan penjajahan Belanda menimbulkan rasa lesu dan apati dikalangan penduduk. Karena itu dengan mudah

ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh dan Said Muhammad Rasyid Ridha dari Mesir diterima masyarakat. Penduduk seakan mendapat darah baru tatkala ajaran ini dikembangkan di Sumatera Barat oleh Dr.H.Abdul Karim Anarullah, Syekh Muhammad Jamil Jambek dan Dr.H. Abdullah Ahmad.

Ajaran ini merupakan koreksi atas cara berfikir umat Islam. Iman harus di dasarkan atas Qur'an dan Hadits dan mencari kebenarannya dalam kehidupan dengan menggunakan akal. Islam tidak hanya agama yang mengatur kehidupan manusia sesudah hari kebangkitan tetapi juga mengatur dan memberi petunjuk untuk membina kehidupan umat di atas dunia. Ajaran ini dengan sendirinya tidak hanya membicarakan hubungan antara umat dan Tuhan tetapi juga memberi dasar bagi kehidupan masyarakat. Di Sumatera Barat ajaran ini dilancarkan dalam dua sisten :

1. Sisten pengajaran surau; dipelopori oleh Dr.H.Abdul Karim Anarullah dan Syekh Muhammad Jamil Jambek. Di sini utama diselenggarakan pengajaran agama Islam yang di sandarkan kepada akal dan bukan naql serta ijtihad dan bukan taqlid.
2. Sisten pengajaran sekolah, dimana disamping diajarkan ilmu agama sebagai yang diselenggarakan dalam sisten pengajaran surau juga diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum.

Kedua sisten pendidikan ini melahirkan kaum terpelajar yang tidak hanya berpengetahuan agama Islam tetapi

MILIK PERPUSTAKAAN  
- IKIP-PADANG -

juga berpengetahuan umum. Kebesaran kebudayaan Islam menjadi dasar bagi pandangan sosial dan politik mereka. Kekuasaan penjajahan Belanda tidak hanya merupakan kekuasaan asing yang harus disingkirkan tetapi juga merupakan golongan kafir. Mereka tidak menghargai kaum penghulu karena mereka ini menjadi kaki tangan penjajah.

Untuk melakukan perubahan-perubahan dalam cara berfikir dan bertindak penduduk negeri guna dapat membangun suatu masyarakat yang dapat mengikuti perkembangan dunia sekitarnya, didirikanlah beberapa organisasi.

Organisasi-organisasi Muhammadiyah, PSII, PERMI dan sebagainya tidak hanya merupakan lembaga tempat menyalurkan kesadaran sosial dan kesadaran politik penduduk negeri tetapi juga merubah sikap dalam menghayati pola pimpinan dan pengambilan putusan yang jauh berbeda dengan apa yang mereka kenal dalam kelompok kekerabatan dan negeri. Dengan dan melalui organisasi-organisasi ini juga terjadi perubahan dalam pengertian rasa solidaritas serta ruang lingkup kerja sama yang jauh melampaui batas-batas kelompok kekerabatan dan negeri. Hal ini pada masa-masa berikutnya menjadi dasar untuk bertumbuh dan berkembangnya perasaan nasionalisme Indonesia.

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ajaran perbaharuan ini ingin merubah susunan dan gerakan masyarakat negeri melalui perubahan-perubahan dalam sikap, nilai-nilai serta cara berfikir individu-

55  
individu. Konflik-konflik yang terjadi dapatlah ditafsirkan bukan sebagai konflik vis a vis agama dan adat saja tetapi lebih merupakan konflik politik antara penghulu, pemegang kekuasaan tradisional dengan alim ulana dan guru-guru agama yang mempunyai pandangan yang luas baik mengenai agama maupun mengenai masalah-masalah umum.

Bagi golongan terakhir agama adalah kebenaran yang tercermin dalam sikap, nilai-nilai dan tingkah laku. Agama Islam dengan sendirinya bersifat menyempurnakan adat. Tidak terdapatnya pertentangan vis a vis agama dan adat telah menyebabkan terdapatnya hubungan yang erat antara kaum pembaharu, alim ulana serta guru-guru agama, dengan penduduk negeri yang akan mendorong serta menjadi dasar bagi aktifitas-aktifitas sosial dan politik dimasa-masa berikut. Tidak dapat disangkal bahwa konflik batin yang ditimbulkan oleh pertentangan konsep agama dan adat seperti pertentangan dalam sikap sebagai bapak yang baik menurut agama dengan bapak menurut adat serta pertentangan dalam mengatur warisan. Seperti juga telah dinyatakan dalam uraian-uraian di muka, pertentangan tersebut berjalan demikian lamanya dan perkembangannya bergantung pada pertumbuhan kesadaran penduduk negeri sebagai seorang Muslim yang baik.

## B A B IV

### P E N U T U P

Walaupun catatan yang khusus mengenai jumlah penduduk suku bangsa Minangkabau tidak ada namun dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mereka berdiam di luar daerah propinsi Sumatera Barat.

Perpindahan penduduk suku bangsa Minangkabau telah dimulai jauh sebelum penjajahan Belanda. Daerah Minangkabau Timur seperti yang kita kenal dari sejarah meliputi daerah sehiliran sungai Kampar, sungai Inderagiri dan sungai Batang Hari. Daerah-daerah ini disebut rantau.

Rantau langsung di bawah pemerintahan raja Minangkabau. Daerah-daerah rantau ini terutamanya menghasilkan lada yang mengundang kedatangan laskar kerajaan Singosari. Dengan ekspedisi Panalyu mulailah timbulnya kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagarruyung.

Walaupun silih berganti kerajaan yang menguasai daerah rantau ini namun secara kulturil masih dekat hubungannya dengan suku bangsa Minangkabau. Daerah Kampar dan Inderagiri sekarang termasuk propinsi Riau sedangkan daerah Batang Hari termasuk propinsi Jambi.

Di samping daerah rantau terdapat pula beberapa bandar yang sebagian besar menampung aktifitas penduduk suku bangsa Minangkabau dalam lapangan perdagangan. Yang terkenal diantaranya dan sekarang masih tetap merupakan pusat perdagangan adalah Pariaman dan Padang.

Dengan bertambah baiknya alat perhubungan antara daerah-daerah di Indonesia maka makin bertambah banyaklah jumlah penduduk suku bangsa Minangkabau pindah keluar daerah dan tidak hanya terbatas pada daerah-daerah disekitarnya. Mereka bergerak dalam seluruh lapangan kehidupan tetapi yang terbanyak berusaha dalam bidang perdagangan dan usaha-usaha swasta lainnya. Di kota-kota besar mereka telah meleburkan diri dalam kehidupan bersama dengan suku-suku bangsa lainnya.

Sampai berapa jauh mereka masih mendukung nilai-nilai kulturil Minangkabau sukar diketahui. Rasa solidaritas kelompok kekerabatan dan negari di salurkan melalui organisasi-organisasi yang terutama bergerak dalam usaha-usaha sosial. Tidak jarang organisasi-organisasi ini dapat menyumbangkan buah pikiran serta bantuan-bantuan keuangan guna perkembangan dan kenajutan negari seperti pembangunan gedung sekolah, mesjid, jembatan dan sebagainya. Satu kesimpulan dapat kita ambil bahwa walau bagaimanapun namun kekuatan kelompok kekerabatan dan negari serta dukungan atas nilai-nilai kebudayaan Minangkabau sudah jauh berkurang di kota-kota besar tempat mereka tinggal dibandingkan dengan kehidupan di negari-negari.

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau ada suatu dorongan bagi anggota pria untuk meninggalkan kelompok kekerabatan untuk selama waktu tertentu terutama pada waktu yang bersangkutan masih belum berumah tangga.

Hasil yang dibawanya dari rantau akan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah dewasa dan telah dapat menjalani hidup dengan baik. Sampai akhir-akhir ini banyak alasan yang dapat mendorong keinginan untuk merantau. Sebagian bersifat sosial, kejiwaan dan sebagian lagi mungkin bersifat ekonomi, politik dan sebagainya. Dari uraian-uraian terdahulu ternyata bahwa sistem ekonomi uang, sistem pemerintahan modern dan perkembangan serta pembaharuan ajaran Islam, telah memberikan pengaruh yang sangat mendalam atas kehidupan penduduk negari. Dalam hal ini ternyata bahwa penduduk negari ikut aktif hingga perubahan yang terjadi betul-betul merupakan satu jalinan yang kuat. Terjadilah perubahan-perubahan pandangan dan sikap yang mengarah kepada penilaian atas sistem kelompok kekerabatan dan sosial beserta seluruh aspek-aspeknya, yang selama ini mengatur kehidupan penduduk negari.

Pada tingkat pertama tentu akan menimbulkan konflik di dalam diri pribadi penduduk negari, konflik antara nilai-nilai serta pola-pola bertingkah laku yang selama ini menjadi tuntunan bagi penduduk negari mengelompokkan diri dalam sistem kekerabatan serta sistem sosial dan seluruh aktifitas kehidupan dengan pola bertingkah laku dimana penduduk negari pribadi dianggap sebagai bagian terkecil dan otonom untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan politik.

Konflik-konflik ini akan melotus dalam bentuk penyimpangan diri (alienasi) atau dikeluarkan berupa protes seperti didapati dalam novel-novel atau karangan-karangan lainnya.



Cara pertama dilakukan dalam bentuk merantau yakni meninggalkan atau keluar dari kelompok kekerabatan dan sosial negari dalam bentuk kehidupan di luar daerah propinsi Sumatera Barat. Dengan adanya jalan keluar ini maka konflik di dalam negari akan berkurang dan negari kembali dalam keadaan seimbang. Ini berarti bahwa negari telah kehilangan daya pendorong bagi timbulnya perubahan-perubahan, hingga struktur dan sistem kekerabatan dan masyarakat negari tidak banyak berubah.

Hal ini akan mengakibatkan pula bahwa kehidupan di negari akan sangat jauh berbeda dengan kehidupan di kota.

Dengan adanya beberapa daya tarik kehidupan kota, kehidupan negari akan semakin terpencil yang berarti pula bahwa penduduk negari akan tetap hanya terdiri dari mereka yang hidup dan mempertahankan struktur dan sistem kekerabatan dan sosial lama dengan pertanian sebagai basis penghidupan. Masyarakat negari dengan cara ini tidak saja akan kehilangan para pelopor untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak tetapi juga kehilangan anggota-anggota yang berpengalaman untuk melakukan pembangunan-pembangunan dalam bidang teknik dan ekonomi. Merantau tidak hanya merupakan jalan untuk mengembangkan pribadi-pribadi anggota suku bangsa Minangkabau tetapi juga merupakan penghalang atau setidaknya mengurangi kecepatan proses perkembangan dan pembangunan dalam seluruh segi kehidupan ekonomi dan sosial di negari-negari dalam propinsi Sumatera Barat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, Taufik; Adat and Islam, An Examination In Minangkabau,  
Majalah Indonesia No. 11 tahun 1966.

\_\_\_\_\_ ; Schools and Politics; The Kaum Muda Movement in  
Wess Sumatera (1927-1933), Monograph Series Cornell Univer-  
sity Press Ithaca 1971.

Abrar, Drs.; Pemerintahan Nagari Suatu Pandangan Sosiologis, APDN  
Bukittinggi 1968.

A m i r. B.; Sejarah Sumatera Barat, Proyek P3KD 1966.

Bachtiar, Harsja W., Negeri Taram, Masyarakat Desa di Indonesia  
masa ini, Koentjaraningrat, editor Universitas Indonesia 1970.

Josselin de Jong, P.E. De; Minangkabau and Negeri Sembilan, Socio Pol  
litical Structure in Indonesia Bhratara 1960, Jakarta.

Radjab Muhammad, Sistem Kekerabatan di Minangkabau, CFMS Press Padang 1969.  
1969.

Schrieke B.J.D. Pergolakan Agama di Sumatera Barat, Bhratara 1973 ,  
Jakarta.

Nasroen, Prof.Mr.M., Dasar Falsafah Adat Minangkabau, CV Penerbitan  
Pasaman Jakarta.

Maruhum Batuah A.M. Dt. Bagindo Tanameh D.H. Hukum Adat dan Adat Mi-  
nangkabau, Penerbit Poesaka Deli Jakarta, 1953.

Penghulu R.Dt. I.H; Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau,  
Penerbit LKAAM Sumatera Barat Padang, 1968.

Junus Drs. Umar; Kebudayaan Minangkabau Manusia dan Kebudayaan di  
Indonesia, Prof.Koentjaraningrat ed Penerbit Jambatan Jakarta,  
1971.

Loeb, Edwin M; Sumatera Its History and People, Oxford in Asia Paper  
backs 1972.

Benedict Ruth; Pola-Pola Kebudayaan, Penerbit PT.Pustaka Rakyat Ja-  
karta, 1962.

Koentjaraningrat, Prof; Pengantar Antropologi, Penerbit PD Aksara  
Baru, 1970.

\_\_\_\_\_ ; Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Penerbit PT.Dian  
Rakyat 1974.

Harsoyo Prof. Pengantar Antropologi, Penerbit Binatjipta 1972.

Basa Nagari Dt.B. Falsafah Pakaian Penghulu di Minangkabau, Penerbit  
C.V.Eleonora Payakumbuh 1966.

Kantor Gubernur Sumatera Barat, Sumatera Barat Dalam Angka 1972, Padang.

Dobbin, Chritine, Indonesia, (Tuanku Imam Bondjol) Cornell Modern Pro-  
yek No. 131972.